

**SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDY FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(LPPOM)) PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh :

**MELDA ADEVIA
NPM : 1441030071**

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
TH.1440H/2018M**

**SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDY FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(LPPOM)) PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh :

MELDA ADEVIA

NPM. 1441030071

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Hj.Rodiyah, S.Ag, MM

Pembimbing II: Baddarudin, S.Ag, M.Ag

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1440H/2018M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung. Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Pelaku usaha harus mengikuti prosedur sertifikasi halal setiap proses sertifikasi dijalankan tim auditor dengan melakukan fungsi pengawasan diantaranya: tahapan pengawasan, metode pengawasan, Dengan Latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Proses Tahapan Pengawasan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung?, Bagaimana Metode Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi Lampung ?, Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini kualitatif dan sifat penelitian ini deskriptif. Populasi penelitian ini berjumlah 20 pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung, dan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu 5 kepengurusan. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung dalam Proses sertifikasi halal melalui beberapa tahapan yaitu : 1. Pengajuan permohonan yang meliputi : Identitas perusahaan, jenis dan nama produk, daftar produk olahan, daftar bahan baku produksi, alur proses produksi, lingkungan dalam perusahaan, peserta denah lokasi. 2. Pemeriksaan lokasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung memberikan informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan tim audit kepada perusahaan terkait. 3. Observasi lapangan pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah bahan dan proses produksi mengandung atau terkontaminasi unsur haram atau tidak. 4. Pengambilan sample hanya dilakukan untuk bahan yang dicurigai mengandung babi dan turunannya yang dianggap perlu.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(STUDY FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS
ULAMA INDONESIA (LPPOM) PROVINSI LAMPUNG**


Nama : **Melda Adevia**
NPM : **1441030071**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Rodiyah, S.Ag. MM
NIP. 197011131995032002


Badaruddin, S.Ag. M.Ag
NIP. 197508132000031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag. M.Ag
NIP. 197206161997032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suramin Telp. : (0721) 704030 Sukaramé 1 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Study Fungsi Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung**” disusun oleh, **Melda Adevia, NPM: 1441030071**, program studi **Manajemen Dakwah**, Telah di Ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 5 September 2018**

Tim Penguji

Ketua

Hj. Suslina Sanjaya, S.A.g, M.Ag

Sekretaris

Rauf Tamim, M.Pd.I

Penguji I

Dr. Abdul Syukur, M. Ag

Penguji II

Hj. Rodiyah, S.Ag, MM

Penguji Pendamping

Badaruddin S.Ag, M.Ag

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS.Al-Baqarah : 172).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis kecilku ini. Sebagai tanda bukti cinta tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku, bapakku Ismail dan ibuku Ernawati yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti, memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Kakak perempuan Melyana, Maya Sari, Erik Nirwana dan Adik Mutia Ayu Safitri yang selalu aku sayangi dan cintai.
3. Sahabat-sahabatku tercinta Wiwit Putri Ramandhani, Ana Septia, Dwi Safitri dan teman teman lain nya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
4. Serta Alamamaterku tercinta Kampus UIN Raden Intan Lampung beserta staf-stafnya baik dari Dosen semua staff kependidikan serta karyawan yang telah melayani dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Melda Adevia dilahirkan di Kotadalam pada tanggal 14 Juli 1995, anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Ismail dan Ibu Ernawati.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 1 Campang Tiga selesai pada tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidomulyo selesai pada tahun 2011. Sekolah Menengah Atas Utama 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (UIN) Raden Intan Lampung di mulai pada semester I TA.2014 M/1436 H.

Bandar Lampung,

Melda Adevia
1441030071

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si yang telah memberikan rekomendasi sehingga mempermudah dalam proses perijinan penelitian
3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Ibunda Hj. Suslina Sanjaya, S.A.g., M.Ag yang telah memberikan arahan, motivasi, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu Hj.Rodiyah, S.Ag, MM dan Pembimbing II Bapak Badaruddin, S.Ag, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
5. Tim sidang munaqosyah penguji I Bapak Dr. Abdul Syukur, M. Ag, penguji II Ibu Hj. Rodiyah, S.Ag., MM, ketua sidang Ibu Hj. Suslina Sanjaya, S.A.g., M.Ag, dan sekretaris Bapak Rauf Tamim, M.Pd.I .

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak Suryani S.Sos., MM Selaku Anggota Dewan Pembina Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dan Bapak Maskut Candranegara S.Pd.I Selaku bidang Kesekretariatan beserta jajaran nya yang telah terlibat memberikan sumber data serta informasi yang akurat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa suatu halangan apapun.
8. Bapak dan Ibu kakakku dan adikku yang selalu mendo'akanku dan menjadi semangat hidupku.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Wiwit Putri Ramandhani, Ana Septia, Dwi Safitri Kawan-kawan KKN Kelompok 142, Seangkatan MD 2014 dan teman teman lain nya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, bantuan, dukungan, dan motivasi serta semangat yang kalian berikan.
10. Keluarga besar UKM-F Rabbani terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan referensi buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, akan mendapat balasan kebaikan yang lebih besar disisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, dan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pembangunan dunia pendidikan.

Bandar Lampung,

Melda Adevia
1441030071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	5
C. Latar Belakang.....	6
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Peneliti.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	10
2. Populasi dan Sample	11
3. Sumber dan Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisa Data	16
G. Tinjauan Pustaka.....	17

BAB II FUNGSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Pengawasan	
a. Definisi Pengawasan.....	19
b. Tujuan Pengawasan.....	21
c. Macam-macam Pengawasan.....	22
d. Fungsi Pengawasan.....	24
1. Tahapan Pengawasan.....	29
2. Prinsip – Prinsip Pengawasan.....	31
3. Metode Pengawasan.....	34
B. Sertifikasi Halal	
a. Pengertian Sertifikasi Halal.....	36
b. Dasar Hukum	40

c. Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	42
d. Undang – undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	43
e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label Makanan	44
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal	47
1. Ketentuan Sertifikasi Halal	48
2. Proses Sertifikasi Halal	50
3. Sistem Jaminan Halal (SJH)	52
4. Manfaat Penerapan Sistem Jaminan Halal.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

A. DESKRIPSI KANTOR LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG	
1. Sejarah Berdirinya LPPOM MUI Provinsi Lampung.....	55
2. Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung.....	58
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di LPPOM MUI di Provinsi Lampung.....	58
4. Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung.....	61
5. Sarana dan Prasarana Kantor MUI Kecamatan Provinsi Lampung..	63
6. Proses Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.....	64
7. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal.....	69
8. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal.....	71
9. Kriteria Sistem Jaminan Halal.....	72
10. Daftar Rekapitulasi Sertifikat Halal.....	76
B. Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Dalam Proses Sertifikasi Halal	
1. Pengawasan	
a. Fungsi pengawasan.....	76
b. Tahapan Pengawasan.....	78
c. Prinsip-Prinsip Pengawasan.....	80
d. Metode Pengawasan.....	81

BAB IV SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDY FUNGSI PENGAWASAN LPPOM PROVINSI LAMPUNG

- A. Proses Pengawasan Sertifikasi Halal Yang Dilakukan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung
- B. Fungsi Pengawasan Dalam Proses Pengajuan Sertifikasi Halal..... 88
 - a. Tahapan Pengawasan 91
 - b. Prinsip – Prinsip Pengawasan..... 93
 - c. Metode Pengawasan 94

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 92
- B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Pengurus LPPOM Provinsi Lampung.....	55
2. Daftar Rekapitulasi Sertifikat Halal, Produk Dan Perusahaan.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Judul Skripsi
2. Kartu Konsultasi Skripsi
3. Surat Rekomendasi Penelitian KESBANGPOL
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Majelis Ulama
Indonesia Provinsi Lampung
5. Bukti Hadir Sidang Munaqosah
6. Pedoman Pengumpulan Data
7. Tabel Daftar Produk Halal Tahun 2016-2017
8. Daftar Foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan Penegasan Judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindarkan perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap pokok permasalahan ini. Adapun Judul Skripsi adalah: **“Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Fungsi Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM) Provinsi Lampung”**.

Sertifikasi halal terdiri atas dua kata yaitu “sertifikasi” dan “halal”. Sertifikasi sendiri adalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.¹

Menurut Aziz dan Vui Sertifikasi Halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk.² Sertifikasi diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada. Sedangkan

¹ . Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*. (Jakarta:Gaung Persada Press Group 2013) hlm.12

² . Danang Waskito, Skripsi: *“pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan”* (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm 4

halal berarti segala sesuatu yang di hibenarkan dan tidak dilarang menurut syari'at Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi halal adalah salah satu standard an kriteria yang dibuat untuk melindungi konsumen pada khususnya konsumen muslim dari produk pangan yang berbahaya serta mengandung dzat haram.

Harold kootz mengatakan bahwa fungsi pengawasan manajemen ada 5 (lima) yaitu planning (perencanaan), organizing (organisasi), staffing (penyusunan personalia), actuating (penggerakan), dan controlling (pengawasan).³ Jadi Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan oleh sebab itu diantara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang sangat erat.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Rajabasa, Provinsi Lampung merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim dipandang sebagai lembaga paling berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaan (*ifta'*) yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan

³ . Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6

⁴ . Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Graha Ilmu : Yogyakarta 2006), hlm.133

lapisan masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan.

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketentraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi kehalalan sehingga layak untuk dikonsumsi bagi umat Islam khususnya di Provinsi Lampung.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung merupakan lembaga otonom yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan produk-produk, pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Dalam proses sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung pelaku usaha harus memenuhi beberapa langkah yaitu diantaranya: *Pertama*, Tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi pelaku usaha setelah formulir beserta lampirannya dikembalikan ke LPPOM Provinsi Lampung dan

diperiksa kelengkapannya. *Kedua*, hasil audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli di LPPOM Provinsi Lampung jika memenuhi persyaratan, dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI guna diputuskan status kehalalannya. *Ketiga*, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. *Keempat*, Sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI Provinsi Lampung setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. setiap proses sertifikasi hala yang dijalankan tim auditor dengan melakukan fungsi pengawasan diantaranya: tahapan pengawasan, metode pengawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud Sertifikasi Halal (Study Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dari skripsi ini adalah “Suatu kegiatan proses pengawasan yang dilakukan LPPOM dalam pembuatan surat keterangan halal (Komisi Fatwa) atas suatu produk pangan yang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa”.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Objektif

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung merupakan sebagai lembaga keagamaan dibawah naungan Negara Indonesia menjadi lembaga yang sangat penting

untuk mengontrol perkembangan kehidupan masyarakat. Melihat dari pentingnya hal ini, peran Majelis Ulama Indonesia memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Lembaga di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung yang berkaitan dengan produk-produk halal dan sertifikasi halal dan Majelis Ulama Indonesia yang melindungi masyarakat muslim supaya agar masyarakat muslim dapat menggunakan produk-produk dan kosmetika yang menjamin kehalalan khususnya Provinsi Lampung.

2. Subjektif

Penulis optimis bahwa Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai literature yang dibutuhkan dalam penelitian penulis sebagai referensi.

C. Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Saat ini sertifikasi halal tidak hanya sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap pemakaian suatu produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. Namun kini sertifikasi halal adalah suatu perlindungan bagi masyarakat akan produk yang beredar dipasaran, terutama apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produknya.

Maka dalam hal ini negara bertindak sebagai pengawas dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan kepada pengusaha. Dikeluarkannya sertifikasi halal berarti memberikan kepastian mengenai jaminan produk halal bagi konsumen. Walaupun peredaran produk pangan yang dipasarkan di Indonesia baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri telah memiliki kriteria tertentu dalam standarisasi kesehatan maupun kehalalannya. Namun, perilaku mengkonsumsi makanan halal belum tentu searah dengan banyaknya penduduk beragama Islam.

Sertifikasi halal tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya upaya perusahaan yang bersangkutan untuk mendaftarkan produknya agar diaudit oleh lembaga sertifikasi halal dalam menentukan kualifikasi halal haramnya bahan yang terkandung dalam produk pangan tersebut. Menurut penulis, kepemilikan sertifikat halal bukan hanya untuk suatu produk merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen muslim agar terhindar dari mengkonsumsi produk yang haram.⁵

Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung untuk mengantisipasi adanya sertifikasi halal yang ilegal dan untuk melakukan kontrol terhadap proses produksi dengan melakukan pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dapat menerapkan sebuah sistem pengawasan yang dengan

⁵ .Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 91

menerapkan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun disamping itu pelaku usaha berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal.

Apabila terjadi perubahan bahan, proses produksi dan lainnya pelaku usaha wajib melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. Atas dasar itu lah penulis tertarik mengadakan penelitian tentang sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (study fungsi pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan penulis ingin mengetahui proses pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses tahapan pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana metode pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui proses tahapan pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui metode pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Akademis, diharapkan dapat memberikan Kontribusi dalam Pengembangan tentang Sertifikasi Halal Dalam Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM), Khususnya Manajemen Dakwah.
- b. Praktis, dapat memahami Sertifikasi Halal Dalam Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Yang baik, yang mungkin dapat diterapkan pada Kantor-kantor Lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahaannya.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk vertifikasi teori yang timbul dilapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulangan. Selain itu penelitian kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶

Dengan penulis memakai jenis penelitian ini maka penulis akan memaparkan pernyataan apa yang dihasilkan oleh peneliti dengan bahasanya dan tidak memakai angka-angka. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat yang akan dijadikan penelitian adalah Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

⁶. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 32

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Sumandi, penelitian deskriptif adalah menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi factual, Justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.⁷

Menurut jalaludin Rahmat Peneliti yang bersifat deskriptif memiliki tujuan yaitu :

- a. Mengumpulkan Informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang berlaku.
- c. Membuat Perbandingan atau Evaluasi.
- d. Menemukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka yang menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁸

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi merupakan Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹

Populasi merupakan jumlah secara keseluruhan objek yang akan diteliti.

Populasi juga merupakan suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang

⁷. Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia*, (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005), Cet Ke 1, hlm . 18

⁸. Suharsimi Aritunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 10

⁹. Kuontur Roni, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Buana Printing, 2009, Cet kedua) hlm. 80

merupakan perhatian peneliti. Objek penelitian dapat berupa makhluk hidup, benda, system dan prosedur, fenomena dan lain-lain.¹⁰ Disini yang menjadi populasi penelitian adalah semua anggota kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung yang berjumlah 20 orang baik dari pegawai tetap maupun tidak tetap.

b. Sample

Sample adalah sebagian dari perwakilan populasi yang akan menjadi objek penelitian. Dapat dikatakan juga bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari orang populasi. Metode yang dipakai oleh peneliti sendiri dalam pengambilan sampel yakni dengan teknik *judgement sampling* atau *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.¹¹ Adapun kreteria atau ciri-ciri yang penulis tentukan adalah :

1. Kepengurusan yang paling mengetahui kondisi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung
2. Pengurus yang berhubungan dengan perusahaan
3. Minimal telah bekerja aktif dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung minimal 2 tahun. Masuk kedalam bagian dari struktur pengurus

¹⁰ . Op Cit. *Prosedur Penelitian* hlm.145

¹¹ . Ibid, hlm. 146

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung (pegawai tetap).

Berdasarkan kriteria diatas maka keseluruhan sample yang mewakili berjumlah 5 (lima) orang pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan sumber data sekunder.¹² Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.¹³ Subyek dalam penelitian ini yaitu Dewan Pembina (anggota) Bapak Suryani, S.Sos., MM, Bidang Kesekretariatan Bapak Maskut Candranegara, S.Pd.I, Staff di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung bapak Narto, Ibu Tuti, ibu Dwi, Dalam memperoleh data primer, data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknis pengambilan

¹² . Ibid, hlm. 129.

¹³. Ibid, hlm. 220

data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh teknik observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, buku, tulisan), foto, rekaman, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁴Data sekunder diperoleh penelitian dari literature-literatur buku-buku, catatan, foto dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama dari penelitian adalah aktifitas obyek penelitian dilapangan yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari data tambahan berupa dokumen file dan didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya.untuk memperoleh data primer yang diinginkan, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai¹⁵. Penulis mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka kepada responden.

¹⁴. Ibid, hlm. 221

¹⁵. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),hlm.105

¹⁶. Irawati Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S,1989),Cet. Ke-1, hlm. 92

Pedoman wawancara yang digunakan adalah metode wawancara berstandar, ialah wawancara yang direncanakan berdasarkan pedoman atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁶ Objek dalam wawancara ini adalah pengurus di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dan staff Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung. Karena wawancara menjadi metode pokok yang penulis gunakan, maka data yang dihimpun adalah data tentang proses pengawasan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

b. Observasi

Observasi Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang individu atau penyelidik dengan menggunakan mata sebagai alat melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat. Observasi yang penulis lakukan pada Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung adalah *Observasi non parinticipant*. Peneliti tidak turut ambil bagian atau tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada objek yang diamati.¹⁷

Data yang diinginkan melalui metode ini adalah berupa pengamatan langsung terhadap proses sertifikasi halal dalam pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung.

¹⁷ . Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997) cet. Ke-1 Hlm. 78

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang baru, berupa catatan, file yang berisi informasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Provinsi Lampung dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai pendukung dari data observasi dan metode pengumpulan data utama yaitu wawancara.¹⁸

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik koperatif, penulis membandingkan kondisi obyektif di lapangan dengan kondisi yang ideal (teoritis). Kemudian langkah selanjutnya adalah penulis mengambil sebuah kesimpulan, kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalahan pada rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang sertifikasi halal dalam pengawasan.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis baru mengangkat beberapa

¹⁸. Op.,Cit, hlm. 108

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis .

Ervina Dwi Jayanti, *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Tahun 2011. Penelitian disini menurut peneliti berbeda dilihat dari penulis tersebut mengkaji bagaimana proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM Yogyakarta serta dapat tidaknya sebagai upaya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen ditinjau dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan lokasi yang berbeda.¹⁹

Danang waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015. Mengkaji bagaimana pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal pada mahasiswa muslim di Yogyakarta. Pada tahun penelitian tidak sama dan dalam menganalisis penulis meyakini berbeda karena jurusan dari masing-masing peneliti yang berbeda.²⁰

¹⁹ . Ervina Dwi Jayanti, *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Tahun 2011).

²⁰ . Danang waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015).

BAB II

FUNGSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Fungsi Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

G.R Terry menyatakan : controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard. Artinya pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹

Sujanto dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, mendefinisikan pengawasan sebagai Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

M. Manulang dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Manajemen*, mendefinisikan pengawasan sebagai “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

¹. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 245

Henri Fayol dalam bukunya General and Industrial management menyatakan : control consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adapted, the instruction issues and principles established. it has for object to point out weakness and errors in order to rectify them and prevent recurrence. It operates in everything things, people, actions. Artinya pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang: barang-barang, orang-orang dan tindakan-tindakannya.²

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter merumuskan pengawasan merupakan proses *monitoring* terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.³

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik dan pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dapat

² . Sukarna, “Dasar-Dasar Manajemen” (Bandung : Mandar Maju, 2011), Cet Ke-II, hlm. 110

³ . Ismail Solihin, “Pengantar manajemen” (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 193

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan ataukah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar dapat diambil langkah-langkah perbaikan. Menurut Arifin Abdul Rachman mengatakan pengawasan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyimpangan.
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan sangatlah penting karena untuk melakukan perbaikan bila terjadi hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah dibuat.⁴

3. Macam-macam pengawasan

Dalam pengawasan dikenal atas beberapa tentang macam-macam pengawasan antara lain:

⁴ . Ibid, hlm.142

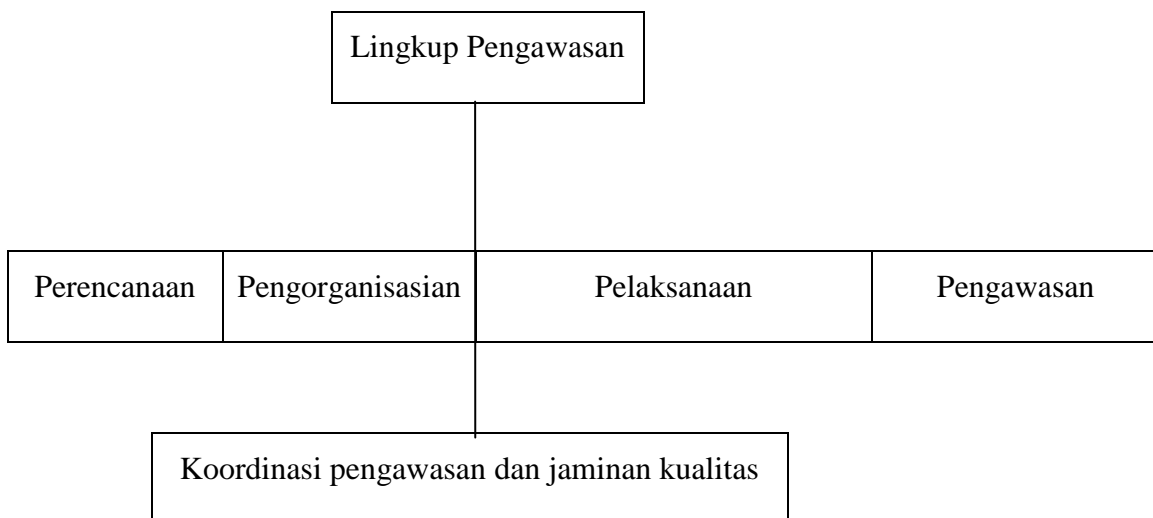
- 1) *Internal control*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer kepada bawahannya. Cakupan dalam pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. *Audit control*, adalah pemeriksaan atau penilaian atas masalah yang berkaliatan dengan pembukuan perusahaan, jadi pengawasan atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.
- 2) *External control* Adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.
- 3) *Formal control* Adalah peneriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan apat dilakukan secara intern maupun ektern.
- 4) *Informal control* adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung⁵

Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana;

⁵.Op.Cit., hlm 248

Jadi Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. ⁶ Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntunan atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengawasan yang mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari bagan diatas bahwa pengawasan mencakup fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang akan menghasilkan koordinasi satu sama yang lainnya dalam pengawaasan jaminan kualitas. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilakukan tanpa ada pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil pengawasan yang

⁶ . Usman Effendi, “Asas-Asas Manajemen”, (Jakarta:Rajawali Press, 2004) Cet. Ke-1.Hlm 205

berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi pengawasan sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan sangat berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena :

1. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
2. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana.
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik.
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan.

Menurut Brantas Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.⁷

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo, fungsi pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengawasan terdiri dari

⁷. Op.Cit., hlm 208

penentuan-penentuan standar, supervise kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta mengoreksi kegiatan atau standar.⁸

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan adalah membantu manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah sistem pengawasan yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya. Sebagai suatu pengawasan manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah:

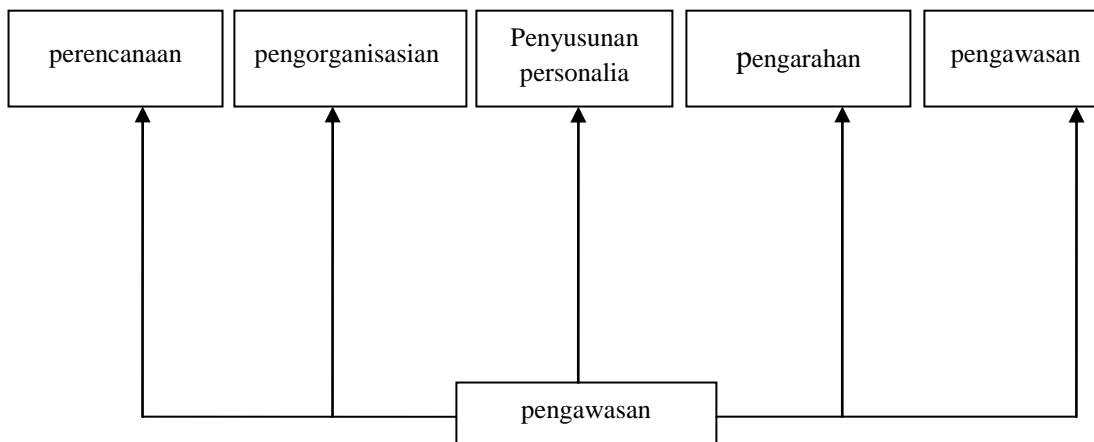
- 1) Untuk menilai apakah pengawasan manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- 2) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah diterapkan.⁹ Oleh sebab itu diantara perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan sangat erat, diibaratkan seperti kedua

⁸ . Ibid, hlm 209

⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6

sisi mata uang yang sama, dan semua fungsi-fungsi dari manajemen mempunyai hubungan yang saling terkait.

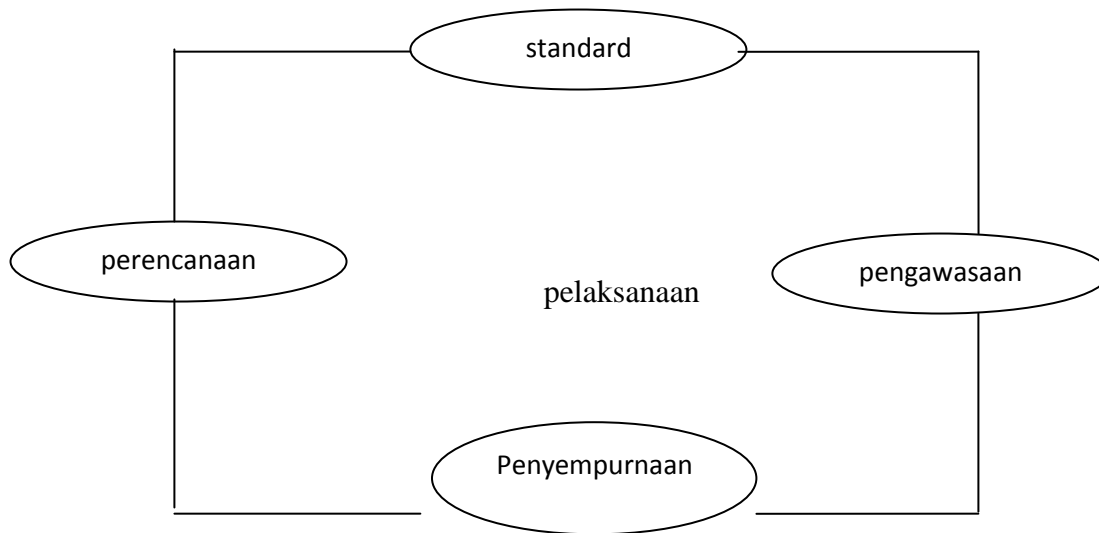
Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan telah dilaksanakan secara efektif dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Berikut ini bagan hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu : ¹⁰



Gambar 1.1
Hubungan pengawasan dengan fungsi-fungsi manajemen

Menurut GR.Terry dalam bukunya “Principles management” fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standard apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila mana perlu memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standard”.

¹⁰ . T. Hani. Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 360



Gambar 2.2
Hubungan timbal balik
Antara perencanaan dengan pengawasan

Dari uraian diatas nampak bahwa fungsi pengawasan menghendaki adanya tujuan-tujuan dan rencana-rencana yang belum dibuat. Dalam sebuah pengawasan perlu adanya sebuah standart (alat ukur) guna mengetahui sejauh mana kegiatan atau aktivitas terlaksana dan pengawasan merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja, agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.¹¹

Dari penjelasan masing-masing pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya perencanaan. Dan rencana tujuan tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Bahwa fungsi perencanaan sangat mempengaruhi kegiatan pengawasan,

Fungsi pengawasan adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian

¹¹ . Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 88

dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan.

5. Tahapan Pengawasan

Tahapan pengawasan dalam fungsi manajemen memiliki beberapa bagian yaitu antaranya:

1. Penetapan standar pelaksanaan : standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
2. Penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan : artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dalam dalam bentuk (*what from*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, inspeksi visual, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat manajer atau staff pengukuran ini mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta mudah diterapkan kepada karyawan.
3. Pengukur pelaksanaan kegiatan : pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu : pengamatan (*observasi*), laporan-laporan (*reports*) metode-metode (*automatic methods*), inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sample.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan:
Perbandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.¹²
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan : tindakan koreksi dapat diambil dalam beberapa bentuk standar pelaksanaan dan perbaiki dan dilakukan secara bersama. Lebih jelasnya, pengawasan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan.
 - b. Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan.
 - c. Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya.¹³

6. Prinsip – Prinsip Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus menerus dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti. Didalam melakukan pengawasan harus diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan jaminan tercapainya tujuan

¹² . George R. Terry, Leslie W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*.(Jakarta: PT.Bumi Aksara 2013),hlm:255

¹³ .Ibid, hlm. 256

dengan mengetahui perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan dengan segera dan mencegah berlarutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan dilakukan pandangan yang jauh untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.

Menurut Yayat M. Herujito dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Beliau mengatakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu sebagai berikut antara lain :

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi,
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi,
3. Luwes,
4. Mencerminkan pola organisasi,
5. Ekonomis,
6. Dapat mudah dipahami,
7. Dapat segera diperbaiki,¹⁴

Menurut Harold Koontz dan Cyrill O'donnel dalam bukunya mengemukakan azas-azas atau prinsip-prinsip pengawasan (controlling) ¹⁵ sebagai berikut:

- 1) Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), kontrol harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.
- 2) Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*), kontrol adalah efisiensi bilamana dapat menghindarkan penyimpangan- penyimpangan dari pada planning sehingga tidak timbul hal-hal lain di luar dugaan.

¹⁴ . Ibid, hlm. 257

- 3) Prinsip tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*), kontrol hanya dapat dilaksanakan apabila manager bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan.
- 4) Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang (*principle of future control*), pengawasan yang efektif harus ditunjukkan terhadap pencegahan penyimpangan planning yang akan datang terjadi baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- 5) Prinsip pengawasan langsung (*principle of direct control*), teknik kontrol yang paling efektif mengusahakan adanya manager bahwa yang berkualitas baik, kontrol dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu suka berbuat salah. Cara yang paling baik untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan planning ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas untuk memiliki kualitas yang terbaik.
- 6) Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plans*), kontrol harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan daripada *planning*.
- 7) Prinsip penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational suitability*), kontrol harus banyak dilakukan sesuai dengan struktur organisasi, manager dan bawahannya merupakan saran untuk melaksanakan *planning*, dengan demikian kontrol yang efektif harus disesuaikan dengan luas *authority* manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi.

- 8) Prinsip pengendalian individual (*principle of individual of control*), control harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol bisa ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi daripada setiap manager.
- 9) Prinsip standar (*principle of standard*), kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat prinsip standar ini menghendaki bahwa setiap planning itu mempunyai ukuran aktivitas yaitu untuk mengukur bahwa suatu program daripada suatu planning.
- 10) Prinsip pengawasan terhadap poin strategis (*principle of strategic point control*), pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam pelaksanaan.
- 11) Prinsip kekecualian (*the exception principles*), efisiensi dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor kekecualian.
- 12) Prinsip daya pengawasan (*principle of flexible of control*), kontrol harus fleksibel untuk menghindarkan kegagalan planning.
- 13) Prinsip peninjauan kembali (*principle of review*), sistem kontrol harus ditinjau secara berkali-kali, agar supaya sistem yang digunakan berguna untuk mencapai.
- 14) Prinsip tindakan (*principle of action*), adalah mengenai apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan penyimpangan daripada planning, organizing, staffing, dan directing.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip pengawasan dapat dilakukan secara efisien bila melakukan perbaikan-perbaikan dengan menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Metode Pengawasan

Metode pengawasan memiliki beberapa bagian yaitu diantaranya :

- a. Pengawasan Langsung, pengawasan langsung adalah apabila anggota pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem *inspektif*, *verifikatif*, maupun dengan sistem *investigatif*.

Metode ini merupakan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

- b. Pengawasan Tidak Langsung, pengawasan tidak langsung adalah apabila anggota pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

- c. Pengawasan Formal, pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh anggota pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- d. Pengawasan Informal, Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya.¹⁶ Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.¹⁷

¹⁶ . Zamani, *Manajemen*, (Jakarta : Badan Penerbit IPWI1998), hlm. 132

¹⁷ . Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratorium atau caralain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.¹⁸

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Namun sertifikasi halal masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga belum ada *mandatory* (kewajiban) dari pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat memperoleh sertifikasi halal sehingga masih banyaknya ditemukan produk makanan yang belum bersertifikasi halal. Namun ditahun 2019 sertifikasi halal hukumnya wajib bagi pelaku. Sertifikat halal diberikan kepada perusahaan setelah produk dari perusahaan tersebut lolos uji halal oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁹ Hal ini memberi wewenang bagi perusahaan untuk mencantumkan logo halal dalam kemasan produknya. Setiap Muslim akan mengkonsumsi makanan yang halal (diizinkan) dan *toyyiban* (bermanfaat). Makanan atau produk yang halal ditandai dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk.

¹⁸ . Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen & sertifikasi Halal*, (Malang:UIN Maliki Press 2011), hlm. 140

¹⁹ . Ibid, hlm 141

Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.

Menurut Zailani, Omar, dan Kepong mengatakan bahwa sertifikasi halal adalah sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, pembasmian kuman, penyimpanan, pengangkutan, sebaik mungkin sebaik praktik manajemennya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal (*halal certification*) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman, dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal menjamin keamanan suatu produk agar bisa dikonsumsi umat muslim.²⁰

Produk yang bersertifikat halal juga menandakan kebersihan, kualitas, dan highenis suatu produk. Sertifikat halal akan memberi *image* positif berupa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan selaras dengan sikap positif seorang muslim untuk lebih memilih produk bersertifikat halal dari pada produk tanpa sertifikat halal.²¹

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikasi halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang

²². Danang Waskito, Op.Cit., hlm 13

²³. Ibid, hlm. 14

menikmatinya, maka dari itu sertifikasi halal sangatlah berpengaruh kepada konsumen yang menikmati makanan, dan minuman diperusahaan tersebut.

Adapun tujuan dari sertifikat halal adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal jaminan halal dari produsen. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syari'at Islam.

Jadi manfaat sertifikasi halal adalah untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan sesuai syariat Islam.²²

Suatu produk perlu mendapatkan sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai alat strategi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga anjuran untuk mengonsumsi pangan halal. Bentuk penyadaran kepada masyarakat baik itu dari sisi produsen untuk selalu menyadari pentingnya sisi konsumen yaitu dengan mengajak

²² . Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2011), hlm.192

umat untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk-produk pangan yang akan di konsumsi. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin kelangsungan usahanya. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-batan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menetralkan batin konsumen muslim.

Namun, ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal. Pemegang sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Masa berlaku sertifikat halal selama dua tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui ketentuan tersebut untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *fotocopy*-nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*). untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum hala haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal adalah sebagai berikut :²³

²³ . Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:Toha Putra 2000), hlm. 39

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS.An-Nahl 114)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu ngatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS. An-Nahl:116).²⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “ Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” (QS. Al Baqarah : 168)

²⁴. Sofyan Hasan, *sertifikasi halal dalam hukum positif*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo 2014), hlm.208

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan atau jasa) yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

3. Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 2 terdapat asas perlindungan konsumen yang berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Disini sudah jelas konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada pasal 4 yang menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak secara diskriminatif.

Sedangkan pasal 5 (lima) diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.

Berdasarkan penjelasan setiap pasal diatas bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang atau jasa dengan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Bagi masyarakat muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting karena menyangkut pelaksanaan syari'at Islam dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.²⁵

4. Undang – undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang – undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal berkaitan yang berkaitan masalah kehalalan produk pangan yaitu: pasal 97, ayat (1),(2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan pada kemasan pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁵ .Ibid, hlm. 209

(3) Pencantuman label didalam dan pada kemasan pangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label Makanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label Makanan, yang diubah dengan keputusan menteri kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor: 82/Menkes/SK/1996.²⁶

²⁸. Sofyan Hasan Op.Cit., hlm 213

Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia serta surat persetujuan pencantuman tulisan halal pada label dari departemen kesehatan(sekarang badan POM). Makanan halal (berdasarkan keppmenkes RI nomor 82 tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam. Dalam pasal (3) keppmenkes disebutkan yaitu:²⁷

1. Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” yaitu :

- a. Mie;
- b. Bumbu masak;
- c. Kecap;
- d. Biskuit;
- e. Minyak goreng;
- f. Coklat atau permen;
- g. Susu, es krim;
- h. Daging dan hasil olahannya;
- i. Produk lain yang dianggap perlu.²⁸

2. Produk makanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus:

- a. Memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam.

²⁷ . Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

²⁸ .Ibid, hlm 214

b. Diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal.

Pasal (8) yang berbunyi “produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal”.

Pasal (10) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemberian persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan setelah setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai.
2. Tim penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari unsur Departemen Kesehatan dan Departemen Agama.
3. Tim peneliti dalam melaksanakan tugasnya mempergunakan pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal (11) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hasil penilaian tim penilai disampaikan pada dewan fatwa untuk memperoleh persetujuan atau penolakan.
2. Permohonan yang telah memperoleh persetujuan diberikan surat keterangan “Halal”.

Pasal (12) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan dari komisi fatwa, Direktur Jenderal memberikan:
 - a. Persetujuan bagi yang memperoleh surat keterangan “Halal”
 - b. Penolakan bagi yang tidak memperoleh surat keterangan “Halal”
2. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal (17) yang berbunyi: “makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman “Halal” sebelum ditetapkan keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan ini”.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal sebagai berikut:

- a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
- d. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- f. Badan penyelenggara jaminan produk halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk jaminan produk halal.

- g. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.
- h. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemerisaan kehalalan produk.
- i. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- j. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.²⁹

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi atau labelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatka kepastian hukum atas produk – produk pangan yang beredar di pasaran , sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.

7. Ketentuan Sertifikasi Halal

Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat. Adapun ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan

³⁰.Ibid, hlm 215

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung terkait pemberian sertifikasi halal sebagai berikut³⁰ :

a. Kesiapan Jminan Halal dari Perusahaan

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka yang bersangkutan disyaratkan menyiapkan halal sebagai berikut :

1. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal;
2. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
3. Dalam pelaksanaan, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu panduan halal dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut;
4. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
5. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan uji coba di lingkungan produsen, sehingga jajaran mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik;

³⁰ . Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen. Cet III.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 3

6. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah sistem jaminan halal yang menjamin produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;

Untuk melaksanakan semua hal tersebut perusahaan harus mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

8. Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal memiliki beberapa bagian-bagian antaranya :

- a. Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
 1. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan proses;
 2. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia untuk bahan yang berasal dari hewan ataupun turunannya;
 3. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya yaitu:
 - a. Tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen setelah mengisi formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan

diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu:

- b. Surat resmi akan dikirim oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:

- (1) nama ketua tim dan anggota tim;
- (2) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan.

Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.

- c. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
 - (1) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk;
 - (2) Observasi lapangan;
 - (3) Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alcohol dan yang dianggap perlu.

- d. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Jika memenuhi persyaratan maka, dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk diputuskan status kehalalannya.
- e. Sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menolak laporan hasil audit dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- f. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia.³¹

9. Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Tujuan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, suatu perusahaan harus mampu memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang ditawarkannya

³². Panduan umum sistem jaminan halal, Jakarta, LPPOM MUI, 2008. hlm.8

kepada konsumen. Untuk mendukung upaya tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung telah menganjurkan setiap perusahaan agar menerapkan peraturan yang kemudian disebut Sistem Jaminan Halal (SJH).³²

10. Manfaat Penerapan Sistem Jaminan Halal

Manfaat penerapan sistem jaminan halal diantaranya sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- b. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikat halal.
- c. Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.
- d. Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal.
- e. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- f. Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
- g. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal.³³

³² . Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Propinsi Jawa Timur, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal* , Surabaya : Lutfiansah Mediatama, 2004, hlm.24

³³ . [http://www.halalmui.org/mui14/index/.php/main/go to section/55/1360/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index/.php/main/go%20to%20section/55/1360/page/1) diakses pada 4 september 2017

Sistem jaminan halal mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan sistem jaminan halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syari'at Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

A. Profil Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung

1. Sejarah Berdirinya LPPOM MUI Provinsi Lampung

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung merupakan lembaga dibawah majelis ulama Indonesia dalam yang salah satu tugasnya melakukan pemeriksaan dan pengkajian halal. Selain LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki lembaga lain yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan Fatwa berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung sebagai lembaga pemeriksa.

Berdirinya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung pada tahun LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan pada tanggal 06 Januari 1989 sudah mencapai usia 32 tahun dan pada tahun 1994 pertama kalinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

(LPPOM MUI) Provinsi Lampung mengeluarkan sertifikat halal yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Sedangkan LPPOM MUI provinsi Lampung dibentuk oleh DP Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dan dikukuhkan oleh pimpinan LPPOM MUI Pusat (Prof.Dr. Hj. Aisjah Gerindra) pada tanggal 06 februari 1996 di Hotel Indra Place Bandar Lampung.¹

Dalam hal ini tim auditor LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung yang memeriksa produk halal dalam mengkaji, menganalisis titik kritis kehalalan suatu produk dengan berbasis sains dan teknologi. Dan hasil pengkajian analisis dilaporkan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk dikaji dalam suatu Sidang Fatwa berdasarkan pertimbangan syar'i Fatwa produk halal ini dinyatakan dalam bentuk sertifikat halal (Fatwa tertulis).²

Pembentukan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung didasarkan atas mandat dan pemerintah atau negara agar Majelis Ulama

¹ . MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung: Berkarya Untuk Umat*, (Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014), hlm. 4

² .*Ibid.*, hlm. 5

³ .*Ibid.*, hlm. 7

Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988.³

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementrian Agama, Kementrian Pertanian, Kementrian Koperasi dan UKM, Kementian Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Perguruan Tinggi di Indonesia . Kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan khusus dengan badan POM sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia merupakan persyaratan

dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Sertifikasi halal adalah Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam dan sertifikat halal berlaku selama dua tahun yang merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk setiap perusahaan harus menerapkan sistem jaminan halal.

2. Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung

Visi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung adalah membudayakan umat Islam untuk mengkonsumsi produk halal. Sedangkan misi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajiann pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia
- b. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal melalui penyuluhan dan pendidikan bersama instansi yang terkait
- c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal dengan penyuluhan dan pendidikan dengan mengenai produk halal bersama instansi lain
- d. Mempererat dan memperluas kerjasama dengan Lembaga ISLAM Nasiaonal dan Internasioal yang berorientasi pada Islam.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja di LPPOM MUI di Provinsi Lampung ⁴

Adapun susunan pengurus LPPOM MUI Provinsi Lampung masa Khidmat 2016-2021 yaitu :

a. Dewan Penasehat

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
9. Ketua MUI Lampung Yang Membidangi Komisi Fatwa
10. Ketua MUI Lampung Yang Membidangi Komisi Pemberdayaan Ekonomi

b. Dewan Pembina:

1. Ketua : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH
2. Wakil Ketua : Direktur LPPOM MUI Pusat
3. Anggota : Dr. Ir. Sutikno, M.Sc.

Suryani, S.Sos, MM

⁴.Struktur Organisasi MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

c. Dewan Pelaksana:

1. Direktur : Dr. Ir. Yaktiwo Indriani, M.Sc.
2. Wakil Direktur : Drh. Sugeng Dwi Hastono
3. Wakil Direktur : Samsul Rizal, SP,M.Si.
4. Bendahara : H. Muhammad Ainul Wafa
5. Bidang Kesekretariatan : Maskut Candranegara, S.Pd.I
6. Bidang Auditing dan SJH :Dwi RetnoMulyaningrum, M.Eg.,M.Sc.
7. Bidang Pengkajian dan Penelitian : Ir. Susilawati, MS
8. Bidang Sosialisasi dan Informasi Halal : Dr. Sunandjak Agung Wiwaha
9. Bidang Pelatihan : Refliyanto, M.Pd.I
10. Bidang Organisasi dan Kelembagaan : Mashuri, SP
11. Bidang Standart dan Sistem Informasi Manajemen : Ir. Otik Nawansih, MP

d. Tenaga Ahli

1. Ketua : Ir. H. Agustini, MM
2. Sekretaris : Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., MM
3. Anggota : Dr. H.M Aditya, M.Biomed
Dr. H. Iwan Dulmansyah, SKM., MS
Sri Afrida, S.Farm., Apt.
Dr. Ir., Susi Astuti, M.Si.

4. Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung

Program kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung adalah amanat dari Majelis Ulama Indonesia demi melancarkan dan memastikan produk yang beredar dijamin kepastian halal. Beberapa program kerja Lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung sebagai berikut:

- a. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b. Mengkaji dan mengkonsep peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah makan (restoran), perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan, pengelolaan pangan dan berbagai jenis bahan lainnya agar semuanya dapat dijamin kehalalannya.
- c. Menerbitkan sertifikat halal agar masyarakat merasa tentram dalam mengkonsumsi makanan dan minuman.⁵

Majelis Ulama Indonesia adalah Satu-satunya Lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung merupakan lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan

⁵ . <http://www.muilampung.or.co.id>, Profil MUI Lampung diakses pada tanggal 16 April 2017

⁴ Garis Besar Program MUI Provinsi Lampung Tahun 2016-2021, hlm. 412

⁵ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm.28

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika, apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pengajaran Agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia. Selain itu Lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Lembaga ini didirikan dengan alasan bahwa ajaran Islam telah mengatur masalah makanan dan minuman dengan sedemikian rupa. Makanan dan minuman dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni halal, haram atau *syubhad*. Bahan-bahan yang diharamkan dalam pelajaran agama Islam adalah bangkai, darah, babi dan hewan-hewan yang disembelih dengan nama selain Allah sedangkan minuman yang dikategorikan haram adalah semua bentuk *khamar* (minuman yang mengandung alkohol).

5. Sarana dan Prasarana Kantor MUI Provinsi Lampung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Mobil Mitsubshi MA VEN	1 (Satu) Unit	Didum Hi. Mawardi
2.	Computer PS Duo Core	1 (Satu) Set	Baik (Monitor Rusak)
3.	Printer Epson R 230 dengan tinta Infus	1 (Satu) Set	Rusak
4.	Printer Canon ip 1980	1 (Satu) Set	Rusak
5.	Printer Canon ip 2800	1 (Satu) Set	Baik
6.	AC Spilt 1 PK	1 (Satu) Set	Baik
7.	TV 21'' (<i>Tochiba</i>)	1 (Satu) Unit	Baik
8.	Mesin Air/Jet Pump	1 (Satu) Unit	Baik
9.	Lemari Buku /Perpustakaan (<i>Aluminium</i>)	2 (Dua) Buah	Baik
10.	Lemari Berkas (<i>kayu</i>)	3 (Tiga) Buah	Baik
11.	Lemari Besi (<i>Lion</i>)	1 (Satu) Buah	Baik
12.	Meja Biro (<i>Olympic</i>)	3 (Tiga) Buah	Baik
13.	Kursi Manager	2 (Dua) Buah	Baik
14.	Meja Setengah Biro	2 (Dua) Buah	Sedang
15.	Brankas (<i>Ichiban</i>) (50)	1 (Satu) Buah	Baik
16.	Kursi Tamu	2 (Dua) Set	Baik
17.	Kipas Angin Plafon National	1 (Satu) Buah	Baik
18.	Telepon No. (0721) 786937	1 (Satu) Unit	Gangguan
19.	Spidy + Modem		Baik
20.	Kotak Sampah	2 (Dua) Buah	Baik
21.	Bingkai Masjid & Ayat Kursi	2 (Dua) Buah	Baik
23.	White Board (<i>Agenda Kegiatan</i>)	2 (Dua) Buah	Baik
24.	Jam Dinding	2 (Dua) Buah	Baik
25.	Faximili (<i>Panasonic</i>)	1 (Satu) Unit	Baik
26.	Lambang Burung Garuda	1 (Satu) Buah	Baik
27.	Foto-foto Ketua Umum	6(Enam)Buah	Baik
28.	LCD (<i>Benq</i>)	1 (Satu) Unit	Rusak
29.	Logo MUI Prov. Lampung	1 (Satu) Buah	Baik
30.	Dispenser (<i>National Fresh</i>)	1 (Satu) Buah	Baik
31.	Foto Presiden dan Wapres	2 (Dua) Buah	Baik

Sumber data hasil observasi pada tanggal 10 Juni 2018

6. Proses Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal Di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung

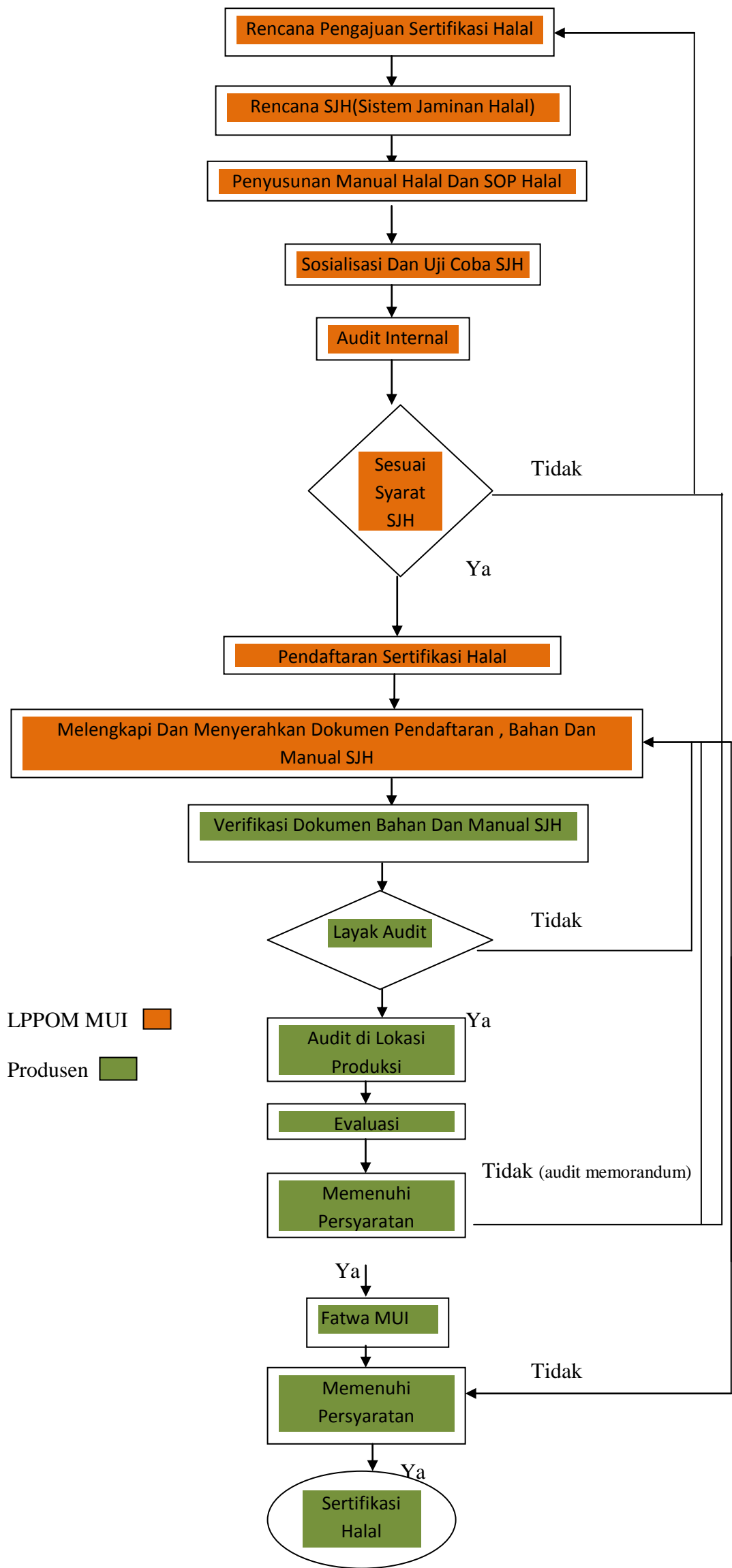
Proses prosedur pengajuan sertifikasi halal di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Membayar biaya pendaftaran pengurusan sertifikasi halal (biaya awal)
Rp.200.000,-
2. Membuat Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan, dan memenuhi 11 Kriteria SJH dan hal pokok lainnya, yaitu:
 - a. Informasi Dasar Perusahaan
 - b. Kendali Dokumen
 - c. Tujuan Penerapan
 - d. Ruang Lingkup Perusahaan
 - e. Kebijakan Halal
 - f. Panduan Halal⁶
 - g. Struktur Manajemen Halal
 - h. Standard Operating Procedures (SOP)
 - i. Acuan Teknik
 - j. Sistem Administrasi

⁶ . wawancara Astuti Romlah, staff Sekretariat LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl 15 mei 2018

- k. Sistem Dokumentasi
 - l. Sosialisasi
 - m. Pelatihan
 - n. Komunikasi Internal dan Eksternal
 - o. Audit Internal
 - p. Tindakan Perbaikan
 - q. Kaji Ulang Manajemen
3. Tim AHI (Auditor Halal Internal) Perusahaan harus sudah mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI Lampung. Dengan biaya pelatihan sebesar Rp.500.000/peserta
 4. Diwajibkan mengisi Formulir dan data bahan-bahan baku & produk yang ada secara rinci;
 5. Lampirkan fotocopy KTP pemohon/penanggung jawab/pemilik perusahaan, surat pendukung perusahaan (SIUP, SITU, Dinas Kesehatan/PIRT, dll.);
 6. Setelah data selesai diisi, sebelum dilaksanakan audit, harus mentransfer biaya sertifikat (sesuai Akad Biaya Sertifikasi Halal) ke Rekening **Bank Muamalat, Atas Nama: LPPOM MUI LAMPUNG, Nomor Rekening: 494-000-4789;**
 7. Penentuan kesepakatan audit (waktunya) disesuaikan antara Pemohon dan Tim Auditor;

8. Penjemputan Tim Auditor, tergantung kesepakatan kedua belah pihak;
9. Waktu selesai Sertifikasi Halal +/- 1 (satu) bulan setelah audit di lapangan;
10. Bagi pelaku usaha yang memperpanjang sertifikat halal, harus mengajukan perpanjangan 3 (bulan) sebelum masa masa berlaku SH habis dan apabila sertifikat yang baru sudah selesai, diwajibkan mengembalikan sertifikat yang lama kepada kepengurusan LPPOM MUI, pada saat sarah terima sertifikat baru;
11. Biaya surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan, bagi perusahaan yang menginginkan, dikenakan biaya Rp 100.000,- (surat keterangan berlaku selama tiga bulan dan tidak bisa diperpanjang).
12. Masa berlaku sertifikat halal selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, dan wajib mengajukan perpanjangan lagi, dua bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis.
13. Berikut ini bagan alur dalam proses sertifikasi halal yang harus dilakukan pelaku usaha sebagai berikut :



Sumber data: Panduan sistem jaminan halal⁷

⁷.Hasil Observasi Tgl. 21 mei 2018

Bagan tersebut sudah jelas proses pengajuan sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha karena setiap kegiatan auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematis, independen dan terdokumentasi yang dilakukan tim auditor halal untuk menentukan apakah sistem penerapan jaminan halal berjalan sesuai dengan ketentuan dengan memberikan manfaat terutama kepada produsen, produsen akan memperoleh kepercayaan dari konsumen akan kehalalan yang dihasilkannya. Hal tersebut mencakup kehalalan dari segi bahan yang digunakan (baku, tambahan, dan penolong) maupun proses produksinya. Dengan demikian produknya akan mendapatkan nilai tambahan berupa keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan.

7. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal

Penetapan fatwa halal di Indonesia adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum penetapan fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal diantaranya :

1. Majelis Ulama Indonesia memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang standar penetapan produk halal.

2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan-perusahaan yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
 - c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.⁸
3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai bahan haram atau mengandung bahan haram (najis), untuk mendapatkan kepastian serta di dikusikan dan dikaji oleh tim di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula tim auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyarankan, bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau dari lembaga lain yang dipandang kompeten, jika perusahaan tersebut tetap

⁸ . Wawancara oleh bapak Suryani Dewan Komisi V MUI Lampung pada tanggal 25 mei 2018

menginginkan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

5. Hasil audit dan kajian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara yang disebut dengan “Laporan Hasil Auditing Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)” dan kemudian diajukan ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk dibahas dalam rapat Komisi Fatwa.
6. Dalam rapat Komisi Fatwa, pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat Komisi.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang jelas-jelas diharamkan atau diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi, dikembalikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan tersebut.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh peserta rapat, maka diputuskan fatwa halalnya oleh rapat komisi tersebut.

9. Hasil rapat Komisi Fatwa yang berupa keputusan fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk ditafiz halal dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam bentuk sertifikat halal. Demikian prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

8. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal

Sistem pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dalam proses sertifikasi halal sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga sertifikasi halal di Indonesia dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Selain sistem pengawasan tersebut yang harus dilakukan oleh perusahaan selanjutnya adalah melakukan perpanjangan sertifikat halal apabila telah habis masa berlakunya.

Adapun prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

- a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
- b. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
- d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
- e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dalam proses sertifikasi halal merupakan salah satu langkah yang sangat penting karena pengawasan proses sertifikasi halal sangat penting.

9. Kriteria Sistem Jaminan Halal

Kriteria sistem jaminan halal merupakan pernyataan yang menjadi syarat kunci bahwa perusahaan tersebut memenuhi kehalalan produk berikut sebelas kriteria sistem jaminan halal diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan halal yaitu pemimpin perusahaan harus membuat kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten, kebijakan halal harus diinformasikan kepada

⁷. Materi Pelatihan Auditor Halal Internal, *Kriteria Sistem Jaminan Halal*, LPPOM Provinsi Lampung

semua manajemen, tim manajemen halal, pekerja, supplier informasi kebijakan halal dapat disampaikan berbagai macam cara sesuai kebutuhan perusahaan (antara lain: briefing, buletin, spanduk, banner, poster, dan lain-lain).

2. Tim manajemen halal yaitu sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal diperusahaan mengatur dan mengevaluasi sistem jaminan halal, tim manajemen halal harus mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.

Dan Koordinator tim manajemen halal harus seorang manajer teknis dan diutamakan seorang muslim yang ditugaskan berada di pabrik, gudang dan dapur.

3. Pelatihan dan edukasi yaitu terdapat prosedur untuk melatih semua personil yang terlibat dalam produksi halal, pelatihan eksternal adalah pelatihan mengenai persyaratan sertifikasi halal dengan trainer dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan pelatihan internal harus dilaksanakan secara terjadwal dengan baik.
4. Bahan yaitu bahan baku bahan tambahan seluruh bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk dan bahan penolong. bahan tidak boleh mengandung bahan dari : darah,

bangkai, bagian dari tubuh manusia, khamr, dan bahan tidak diproduksi dari fasilitas yang dipergunakan untuk produk yang mengandung babi dan turunannya dan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis.

5. Produk yaitu merk/nama produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal jika suatu merk/nama didaftarkan maka semua varian produk harus didaftarkan tidak memiliki kecendrungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.
6. Fasilitas produk yaitu semua nama dan alamat pabrik/fasilitas yang digunakan harus terdaftar, baik dimiliki perusahaan itu sendiri ataupun menyewa dari perusahaan lain dan peralatan produksi tidak boleh dipergunakan bergantian untuk memproduksi produk halal dengan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika fasilitas pernah digunakan bahan yang mengandung babi atau turunannya dibersihkan dengan mencuci sebanyak 7x dengan air, salah satunya dengan tanah atau bahan lain.
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis yaitu seperangkat tatacara kerja yang terdapat prosedur tertulis yang terkait dengan penetapan aktivitas kritis (prosedur tertulis aktivitas kritis harus di informasikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis). Aktivitas kritis mencakup yaitu : mencakup bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas dan peralatan, penyimpanan/penanganan bahan atau produk serta transportasi

8. Kemampuan ditelusuri yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin ketelusuran produk yang disertifikasi dan dapat meyakinkan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang telah disetujui dan fasilitas produksi yang memenuhi kriteria.
9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria yaitu produk yang sudah terjual ditarik kembali karena produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual kepada konsumen yang memerlukan produk halal atau produk dimusnahkan. Audit internal yaitu perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis saat pelaksanaan audit internal dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan hasil audit internal dilaporkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.
10. Kaji ulang manajemen yaitu pimpinan perusahaan melakukan pengkajian ulang terhadap efektifitas sistem jaminan halal sedikitnya satu tahun sekali. Bahan kaji ulang antaranya:
 - a. Hasil audit internal dan eksternal
 - b. Perbaikan dari kaji ulang dari sebelumnya
 - c. Perubahan kondisi di perusahaan.¹⁰

¹⁰. Narto, Staff LPPOM MUI Provinsi Lampung, wawancara tgl. 19 Juni 2018

10. Daftar Rekapitulasi Sertifikat Halal

DAFTAR REKAPITULASI SERTIFIKAT HALAL, PRODUK DAN PERUSAHAAN PROVINSI LAMPUNG¹¹

N o	Tahun	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1	2016	152	290	135	
2	2017	9	16	9	
3					
4					
5					
	TOTAL	161	306	144	

Sumber data: Hasil Observasi dengan bapak Maskut Candranegara pada tanggal 24 maret 2018

B. Pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia Dalam Proses Sertifikasi Halal

1. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memiliki dampak yang sangat positif karena setiap apa yang dikerjakan harus disertai pengawasan setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen muslim untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia.

¹¹ . Wawancara bapak Maskut Candranegara, Kesekretariatan pada tanggal 24 maret 2018

Sesuai ketentuan Majelis Ulama Indonesia dan masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada Majelis Ulama Indonesia dan konsumen muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Oleh karena itu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH) dan terdokumentasi sebagai Manual Sistem Jaminan Halal (SJH).

Dalam UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka Indonesia mengambil jalan tengah untuk persoalan sertifikasi halal. Dimana pengelolaan sertifikasi halal diambil alih oleh Pemerintah, namun masih tetap melibatkan peran Majelis Ulama Indonesia didalamnya.

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam proses sertifikasi halal yaitu dalam hal mengeluarkan fatwa dengan melakukan pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Lampung dalam proses sertifikasi halal adalah Dengan melakukan pemeriksaan terhadap setiap bahan suatu produk merupakan proses untuk menjamin masyarakat bahwa setiap tujuan organisasi akan tercapai bila menjalin hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik. Dengan memiliki visi dan misi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dapat memudahkan dalam proses sertifikasi halal.

2. Tahapan pengawasan

Tahapan yang dilakukan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) memiliki beberapa tahapan yang pertama penetapan standard pelaksanaan sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur) sangat diperlukan oleh perusahaan yang berkualitas dan mendunia.

Standard operasional prosedur sendiri menjadi sebuah hal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan untuk sebagai salah satu bentuk kontrol kualitas terhadap segala proses pekerjaan. Karena sebuah perusahaan terdiri dari berbagai struktur dan lingkup pekerjaan, maka Standard operasional prosedur dari perusahaan tersebut juga hendaknya dibuat menjadi beberapa bagian, yang meliputi masing-masing lingkup pekerjaan.

Tahapan kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan penetapan standard adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Tahapan ini berkaitan dengan tahapan pertama dan dengan melaksanakan audit sistem jaminan halal yaitu: pertama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung memberikan tugas kepada ketua tim auditor dan anggota tim auditor untuk melakukan pemeriksaan bahan produk bersamaan audit

implementasi sistem jaminan halal (sjh) adapun tugas-tugas pokok auditor antara lain:¹²

1. Menerapkan prosedur sertifikasi halal serta membantu untuk penginputan di sistem cerol
2. Membimbing dan mensosialisasikan pembuatan sistem jaminan halal perusahaan
3. Menganalisa bagan alir proses produksi untuk masing-masing bahan utama, bahan tambahan dan bahan penolong dan memeriksa keaslian sertifikat halal serta kebenaran beberapa dokumen pembelian bahan-bahan pada 2 (dua) bulan terakhir
4. Mengamati dan menilai proses produksi dari hulu sampai hilir dan memeriksa gudang tempat penyimpanan bahan-bahan terakhir
5. Menerima dan memverifikasi daftar bahan dan matrix produk yang merupakan hasil audit;
6. Mengambil contoh bahan baku bila diperlukan untuk dianalisa di laboratorium;
7. Memeriksa manajemen halal, kelengkapan dokumen, implementasi dokumen, sosialisasi dan pelatihan SJH, komunikasi pelaksanaan sistem jaminan halal, pemantauan evaluasi SJH, dan pelaporan SJH
8. Pengambilan bukti berupa form-form pelaksanaan SJH;

⁹. Wawancara oleh bapak Suryani sebagai anggota dewan Pembina di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 28 mei 2018

9. Mengambil contoh produk untuk dibawa ke rapat komisi fatwa (khusus produk yang tahan lama)
10. Membuat laporan hasil audit secara tertulis dan disampaikan pada rapat auditor

3. Metode Pengawasan

Metode pengawasan terdapat pada BAB II halaman 34 dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung adalah apabila anggota pengawasan melakukan pemeriksaan langsung pada observasi tempat dan laporan langsung bila diperlukan. Di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) pengawasan langsung saat berkaitan dalam pelaksanaan pemeriksaan bahan produk yang dilakukan tim auditor karena dapat menghasilkan informasi-informasi yang diberikan perusahaan dengan mengambil bukti berupa form-form pelaksanaan sistem jaminan halal yang akan disampaikan saat rapat auditor baik perusahaan kecil, menengah sampai besar .
2. Pengawasan tidak langsung adalah Pengawasan dengan tanpa harus turun ke lapangan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung akan tetapi melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan-laporan tersebut berbentuk laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya menanggapi

pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan oleh bawahan, dan laporan lisan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Karena dalam melakukan laporan lisan yang dilakukan di oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung tim auditor melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengirim tugas kepada tim auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan produksi, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dalam proses sertifikasi halal agar lancar dalam proses pemeriksaan.

BAB IV
SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (STUDY FUNGSI
PENGAWASAN LPPOM PROVINSI LAMPUNG

A. Pengawasan Sertifikasi Halal Yang Dilakukan Oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Lampung

Majelis Ulama Indonesia Lampung melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung telah berusaha untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Dalam sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung merupakan sebuah lembaga otonom yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan produk-produk pangan, obat-obatan dan produk kosmetika agar memberikan keselamatan pangan dan melindungi konsumen muslim. Namun dalam proses sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium.

Peran utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dengan

memberikan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika yang dikonsumsi oleh umat muslim.

Dan ketentuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dalam tahap persiapan yang harus dilakukan pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal bagi produknya adalah terlebih dahulu harus dipersiapkan sistem jaminan halal yang diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual) yang didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijaksanaan manajemen perusahaan.

Sistem jaminan halal yang berisi identitas perusahaan, susunan auditor halal internal dan cara menjamin produksi halal pertahap produk. Pelaku usaha menyiapkan sistem jaminan halal wajib menyiapkan standar operasional prosedur untuk mengawasi setiap titik kritis dalam setiap proses produksi agar kehalalan produknya terjamin.

Baik panduan halal maupun prosedur standar operasional prosedur merupakan panduan proses produksi secara halal yang harus disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan perusahaan, sehingga seluruh jajaran (mulai direksi hingga karyawan) saat memahami bagaimana memproduksi produk yang halal dan baik. Pelaku usaha diwajibkan melakukan audit internal serta mengevaluasi sistem jaminan halal sebagaimana mestinya. Perusahaan harus mengangkat dua orang atau lebih sebagai tim auditor halal internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal. Prosedur Sertifikasi halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dapat diperoleh melalui sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan

Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal diharuskan mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran sertifikasi halal yang telah disediakan di kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung. Formulir berisi antara lain:

- a. Identitas perusahaan
- b. Jenis dan nama produk
- c. daftar produk olahan
- d. Daftar bahan baku produksi dan asalnya
- e. alur proses produksi
- f. Lingkungan dalam perusahaan
- g. Peserta denah lokasi perusahaan

Pelaku usaha diwajibkan pula membuat surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dengan melampirkan panduan halal dan prosedur standar operasional prosedur yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha juga dikenakan biaya administrasi biaya ini nantinya akan digunakan untuk membiayai segala keperluan terkait dengan proses sertifikasi halal.

2. Pemeriksaan lokasi

Setelah semua dokumen pengajuan sertifikasi halal diterima oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung, maka tim auditor halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan audit ke lokasi perusahaan sebelum melakukan pemeriksaan lokasi dilaksanakan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung akan memberikan informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan tim audit kepada perusahaan terkait. Setelah itu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung cq. Direktur akan menerbitkan surat tugas kepada tim auditor halal untuk melakukan pemeriksaan sistem dan proses halal diantaranya :

- a. Nama ketua dan anggota tim auditor halal.
- b. Jadwal (hari dan tanggal) pemeriksaan, selama pemeriksaan berlangsung produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas.
- c. Nama dan alamat (identitas) perusahaan yang diaudit.

3. Observasi lapangan (pemeriksaan bahan dan proses)

Pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah bahan dan proses produksi mengandung atau terkontraminasi unsur haram atau tidak. Disamping itu pemeriksaan ini juga untuk memastikan bahwa manajemen halal perusahaan sudah beroperasi sesuai dengan sistem jaminan halal.

4. Pengambilan *sample*

Pengambilan contoh (*sample*) hanya dilakukan untuk bahan yang dicurigai mengandung babi dan turunannya yang dianggap perlu. Apabila diperlukan, tim auditor akan mengambil beberapa *sample* secara acak untuk kemudian diuji dilaboratorium.

5. Penentuan kehalalan produk

Setelah dilakukan observasi dan laboratorium maka selanjutnya akan dilaporkan dan dievaluasi dalam rapat tenaga ahli yang dikenal dengan sidang internal auditor halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung jika produsen telah dinyatakan memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun teknis maka hasil sidang akan direkomendasikan kepada sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk diputuskan status halal.

Jika setelah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong dalam proses produksi maka diwajibkan segera melapor ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung untuk mendapatkan “ketidakberatan menggunakannya”

B. Fungsi Pengawasan Dalam Proses Sertifikasi Halal

Fungsi pengawasan dalam proses sertifikasi halal sangat mempengaruhi sistem berjalannya sertifikasi halal karena sertifikasi halal memiliki fungsi bagi perusahaan maupun konsumen yaitu diantaranya : Pertama; terlindungnya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal. Kedua; secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Ketiga; mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram. Dan yang terakhir akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dan bagi produsen sertifikasi halal mempunyai beberapa peran penting yaitu :

1. Sebagai penanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip bagi hidup muslim.
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
4. Memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan.

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal dan haram suatu produk yaitu: Departemen Agama, Badan POM, Dan Majelis Ulama Indonesia (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)) Departemen Pertanian Tergabung Dalam Komite Halal Indonesia (KHI).

Sistem pengawasan setifikasi halal berlaku dua tahun sejak dikeluarkannya sertifikat halal sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal.
2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal.
3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dan setelah habis masa berlaku sertifikat halal perusahaan diwajibkan memperpanjang bagi masa sertifikat dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan.
 2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
 3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan bakuserta sertifikat halal dan bagan alur proses terbaru.
 4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
 5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal yang diatas.

Produsen yang tidak mempengaruhi sertifikat halal maka tidak akan diizinkan lagi untuk menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung jurnal halal.

Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama berlakunya sertifikasi halal perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut sistem jaminan halal (SJH), sistem jaminan halal dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Pada UU No. 33 tahun 2014 Tentang jaminan produk halal mengharuskan seluruh produk makanan dan minuman baik olahan dan kemasan bersertifikat halal dan berlabel halal.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan adalah proses sertifikasi halal sangat penting karena selain perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat halal perusahaan tersebut juga bisa mendapatkan omset dari konsumen yang membeli produk halalnya dan konsumen pun merasa tentram dalam membeli produk dengan adanya label yang terdapat pada produk kemasan masyarakat pun dapat mengecek nomor seri yang terdapat dikemasan produk yang beredar dipasaran dengan mendownload aplikasinya “halal MUI” di

playstore setelah itu search ketik halal MUI semua nama produk makanan yang sudah bersertifikasi halal sudah tertera di aplikasi halal MUI dan masyarakat pun tidak perlu cemas akan produk yang beredar dipasaran.

1. Tahapan pengawasan proses sertifikasi halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) provinsi Lampung mempunyai dua tahapan yaitu yang pertama melakukan tahapan pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif yaitu pemeriksaan administrasi, pemeriksaan ke lokasi produksi, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta pemeriksaan laboratorium. Perusahaan harus memberikan informasi kepada tim auditor dengan jujur tidak ada yang dirahasiakan karena setiap tahapan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) provinsi Lampung untuk menjamin umat muslim yang ada disekitar provinsi Lampung khususnya. Tahapan yang kedua penerapan prosedur proses sertifikasi halal memiliki beberapa tahapan yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan : Tahap persiapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menunjuk tim manajemen dari perusahaan minimal dua orang beragama islam dan tim audit internal halal yang harus disiapkan oleh perusahaan di lingkungannya karena sudah dapat dipastikan keterlibatan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.

2. Penentuan pengukur pelaksanaan kegiatan : Tahap registrasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Pengukur pelaksanaan kegiatan : Tahap auditing atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung yang meliputi audit kelengkapan dokumen dan obsevasi lapangan dan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan saat pemeriksaan bahan-produk yang ada diperusahaan maka akan diberikan pengarahan atau nasihat dan diambil tindakan ataupun dilakukan auditing ulang.
4. Pembandingan pelaksanaan dengan standard analisis penyimpangan : Tahapan ini membahas hasil pelaksanaan auditing dan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan : Tahapan ini membahas Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Komisi pihak Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan bila suatu produk yang masih mengandung bahan sudah jelas

diharamkan atau diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan saat auditing dan akan dikembalikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berdasarkan keterangan diatas bahwa tahapan pengawasan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung berjalan secara efektif dan efisien.

2. Metode pengawasan proses sertifikasi halal

Metode pengawasan memiliki dua tahapan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung karena pengawasan langsung sangat efektif dalam menjalankan pengawasan yang dilakukan oleh tim auditor saat pengajuan sertifikasi halal setiap prosedur yang dilakukan tim auditor karena mendapatkan informasi yang jelas selain mendapatkan informasi dengan jelas tim auditor halal pun dapat mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan saat produksi dan terjamin kualitas halalnya dan apabila terjadi penyimpangan tim auditor dapat mengambil sample bahan-bahan diragukan tersebut bila terbukti mengandung bahan-bahan haram perusahaan tersebut diberikan arahan atau nasihat agar perusahaan tersebut bisa mengganti bahan-bahan yang mengandung haram dan bila sudah terlanjur produk tersebut beredar dipasaran maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan menarik produk yang beredar dipasaran. Saat melakukan pengawasan langsung

perusahaan diharuskan memberikan informasi yang akurat baik lisan maupun tulisan.

Sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat memahami dokumen halal yang diberikan oleh perusahaan dengan mengontrol setiap tahapan produksi walaupun tidak harus terjun kelapangan namun pengawasan tidak langsung tidak efektif untuk diterapkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) karena tim auditor hanya dapat melihat data yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa metode pengawasan yang dilakukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang ada dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung memiliki dua metode yaitu metode pengawasan langsung dan tidak langsung setiap metode pengawasan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang ada dikantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung karena sebagai penunjang dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Study Fungsi Pengawasan LPPOM Provinsi Lampung” adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi halal sebagai upaya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Proses sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dapat menjadi penunjang terwujudnya perlindungan hak atas keamanan dan keselamatan konsumen karena salah satu syarat sertifikasi halal.
2. Bahwa produk yang diajukan sertifikasi halal sudah lolos dalam pemeriksaan tim audit meliputi pemeriksaan bahan, proses produksi, dan produk guna mengetahui ada tidaknya kontaminasi unsur haram dan menyangkut aspek kadar bahan yang digunakan dan tatacara produksi. Sertifikasi halal memberikan ketentraman batin, keselamatan, dan keamanan konsumen dalam menjalankan syari’at agama khususnya bagi umat Islam.
3. Konsumen muslim dapat membantu perkembangan industri halal Indonesia, salah satunya dengan menggunakan produk yang telah bersertifikasi halal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil peneitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung harus memberikan informasi yang lebih ditingkatkan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui akan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan yang lebih terpenting bagi pelaku usaha yang harus bersertifikasi halal maupun berlabel halal karena produk yang beredar dipasaran harus berkualitas dan menjamin akan keamanan produk.
2. Bagi para produsen produk makanan sebaiknya mempertimbangkan ketiga faktor yang sudah diteliti pada penelitian ini yakni sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan pada produk. Umat Muslim sekarang ini bukan hanya sekedar menjadi umat agama Islam melainkan konsumen atau pasar potensial produk makanan halal.
3. Bagi pelaku usaha yang terpenting menjaga kualitas produknya, dan jujur dalam menjaga kualitas produknya setiap produk yang bersertifikasi halal karena sangat bermanfaat bagi pelaku usaha selain sebagai untuk mendorong kepercayaan dari masyarakat namun juga memberikan tanggungjawab terhadap jaminan mutu aman untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.

Bahtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos, 1997.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen & sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra 2000.

Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.

Effendi, Usman, *Asas-Asas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hani, T. Handoko, *Manajemen edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2014.

Hasibuan, Malayu P.S. *Manajemen Dasar Pengertian Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara 2006.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : Mandar Maju, 1996.

- LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur, *Bunga Rampai Petunjuk Produk Halal*, Surabaya: Lutfiansah Mediatama : 2004.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Ghalia Indonesia, 1988.
- Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia*, Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005.
- Masry, Maringan, Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia 2004.
- Roni, Kuontur, *Metode Penelitian*, Jakarta : Buana Printing, 2009.
- Singarimbun, Irawati, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S,1989.
- Solihin, Ismail, *Pengantar manajemen*, Jakarta: Erlangga,2009.
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan Dan Kosmetika*. Jakarta:Gaung Persada Press Group 2013.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Terry, George R. dan Rue, Leslie, W. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara 2013.
- Tri, Celina, dan Kristianti, Siwi *Hukum Perlindungan Konsumen. Cet III.*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Yahya, Yohannes *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu : Yogyakarta 2006.
- Zamani, *Manajemen*, (Jakarta : Badan Penerbit IPWI1998), hlm. 132

Internet

<http://www.halalmui.org/mui14/index/.php/main/gotosection/55/1360/page/1> diakses pada 4 september 2017

<http://www.muilampung.or.co.id>, Profil MUI Lampung diakses pada tanggal 16 April 2017

Jurnal

MUI Provinsi Lampung, *Kilas Balik 40 Tahun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung: Berkarya Untuk Umat*, Bandar Lampung: Lintas Kreasi, 2014.

Panduan umum sistem jaminan halal, Jakarta, LPPOM MUI, 2008.

Undang-undang

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal.

Skripsi

Ervina Dwi Jayanti, *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hak Atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Tahun 2011).

Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2015).

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung



2. Pembukaan Acara Sebelum Penyerahan Sertifikat Halal



3. Pemberian Sertifikat Halal Kepada Pelaku Usaha Yang Ada Diprovinsi Lampung





